



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR : 148/KEP/2014
TANGGAL : 8 Agustus 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 148/KEP/2014

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar dalam penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil dan persetujuan teknis dan surat keputusan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperkenankan menandatangani penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil dan persetujuan teknis dan surat keputusan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209.8/KEP/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 76.1/KEP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Persetujuan Teknis dan Surat Keputusan tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2014



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eko Sutrisno
EKO SUTRISNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Menteri Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;

14. Kepala Biro Keuangan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
15. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
16. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
17. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

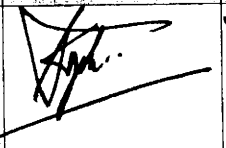
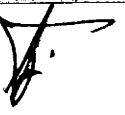
LAMPIRAN –

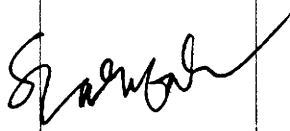
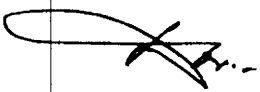
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

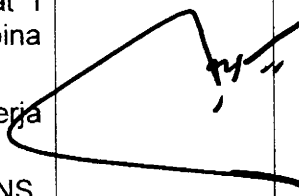
NOMOR 148/KEP/2014 TANGGAL 8 Agustus 2014

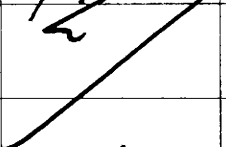
TENTANG

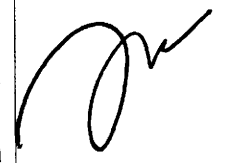
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG MUTASI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. S. KUSPRIYOMURDONO, M.Si. 19560909 198110 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; • Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/ Lembaga.		

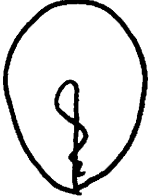
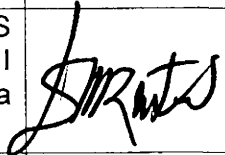
1	2	3	4	5	6	7
2.	SAYADI, S.H., M.M. 19590315 198103 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pengadaan dan Kepangkatan	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; • Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/ Lembaga.		2
3.	Drs. SYARIF ALI, M.Si 19600821 198509 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara	s.d.a		
4.	Drs. DWI WAHYUDI, M.Si 19610826 198111 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sub Direktorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara	s.d.a.		
5.	ALWAZIR, S.H, M.Si 19620620 198603 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama	s.d.a.		

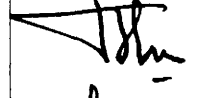
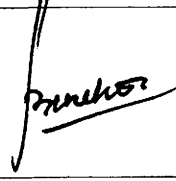
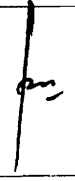
1	2	3	4	5	6	7
6.	Drs. GHOZALI AMIRSYAH, M.Si 19590502 198011 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; • Surat Keputusan Pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/ Lembaga.		
7.	WAGIRUN 19580820 197801 1 003	Penata Tk. I III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		

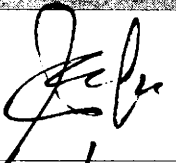
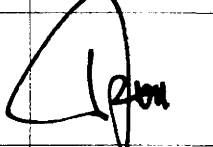
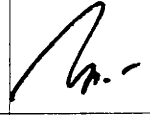
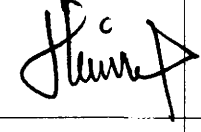
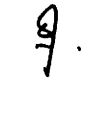
1	2	3	4	5	6	7
8.	SUMARTININGSIH, S.IP 19620627 198412 2 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Pengadaan Kementerian	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		
9.	MARYONO, S.IP 19700306 199103 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Pengadaan Non Kementerian	s.d.a		
10.	ACHMAD YUSAQ, S.E. 19640808 198603 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Perekaman Pengadaan dan Kepangkatan	s.d.a		
11.	KUWADI, S.Sos 19620505 198310 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Administrasi Pengadaan	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		

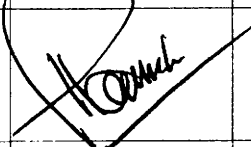
1	2	3	4	5	6	7
12.	JOKO PRAWOKO,S.Sos 19650712 198509 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Administrasi Kepangkatan	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		
13.	SRI MULYATI, S.Sos., M.M. 19620110 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Non Kementerian	s.d.a		
14.	SUHARTO 19650125 198503 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		

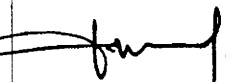
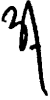
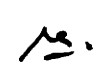
1	2	3	4	5	6	7
15.	SUJARWANTO 19620603 198403 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		
16.	N. JAMILAH, S.Sos. 19620517 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Non Kementerian	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		

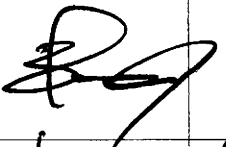
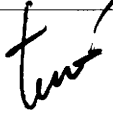
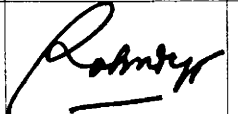
16	2	3	4	5	6	7
17.	R. SUHENDRI HENDRAYATNA 19580512 198009 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Mutasi Lain-lain	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN; • Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c; • Persetujuan teknis peninjauan masa kerja PNS; • Persetujuan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian;		
18.	POREDEN SITORUS, SH 19630706 198503 1 001	Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Madya	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a.		
19.	MAHDALENA, S.Sos. 19640713 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Madya	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.		
20.	SABAM SITOANG 19620211 198503 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		
21.	HERMAN PRASETYO, S.Sos. 19650123 198509 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		
22.	JAYA TERUNA, S.Sos. 19630426 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c.		

1	2	3	4	5	6	7
23.	TATI SARTIKA, S.Sos. 19641203 198403 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c.		
24.	SETRIANI, S.Sos 19690401 199103 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Muda	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.		
25.	HIDAYAT SUPRIYANTA 196009031982011001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.		
26.	Hj. ETY NURYANTI 19611015 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
27.	MURNI WIDAYATI, BBA 19631030 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
28.	AI JANAH 19640418 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
29.	SUDIARTO 196206261985031001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c.		
30.	BENTRI EKOWATI 19630421 198509 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		

1	2	3	4	5	6	7
31.	SABIN 196306031984121001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata golongan ruang III/c.		
32.	HERU ISWANTO 196309241983121002	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
33.	MARINA SARAGIH 196410081984032001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
34.	ANIEK EMBARSARI H. 196505171985092001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
35.	SAHAT SIMANULANG 196303151986031001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
36.	AHMAD SOFYAN 196311141985091001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.		
37.	SUBANDI 196410081984031001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
38.	SUNINGSIH HARTI 196409091991032001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
39.	WINARTI 19730111 199803 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		

1	2	3	4	5	6	7
40.	SRI BUDI APRILADEWI, SAP 197004111991032001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pertama	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.		as
41.	SUNARTO, S.Pd 19590603 198002 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN;		f
42.	EKO AHMAD MIKOYANTO, S.Sos 19640702 198412 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		g
43.	DWI LESTARI PUDJI ASTUTI, SE 19630409 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		as
44.	SRI BUDIHATMI, SE 19620612 198403 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		f.
45.	RUSTIPAN, SE 19640508 198503 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		l.
46.	SUHARTONO 19580117 198008 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		h
47.	TRI WIHARTO 19620510 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		f.

1	2	3	4	5	6	7
48.	DEDE HERMAN 19630422 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN;		
49.	MUSLIH 19630220 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
50.	BAMBANG MUJIONO 19630506 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
51.	ROSNAULI SILALAH 19630320 198403 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
52.	ABDULLAH H, 19630414 198303 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
53.	HASMANAH 19630820 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
54.	SITI MUGIARTINI 19640124 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
55.	SRI RAHAYU 19630419 198403 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		

1	2	3	4	5	6	7
56.	PAWIT ENDANG SRIWIDATI 19630520 198509 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN;		
57.	JANNUS PANGARIBUAN 19630108 198412 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
58.	KARTINAH 19631102 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
59.	RAHMAT HIDAYAT 19640222 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
60.	DADANG HIDAYAT 19650919 198503 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
61.	RAHMAN SUTARNO 19631007 198603 1 002	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
62.	MOHAMMAD AZIS 19630916 198503 1001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
63.	LANDUNG KRISDWIYANTA 19651022 199103 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		
64.	SRI ERIN RUSYATININGSIH 19631110 198412 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		

1	2	3	4	5	6	7
65.	SALIMI 19640503 198509 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	• Penetapan NIP bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; • Penetapan NIP CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg BKN;	<i>JS</i>	<i>4</i>



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Eko Sutrisno

EKO SUTRISNO